

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PAGU INDIKATIF RAPBN TAHUN 2026

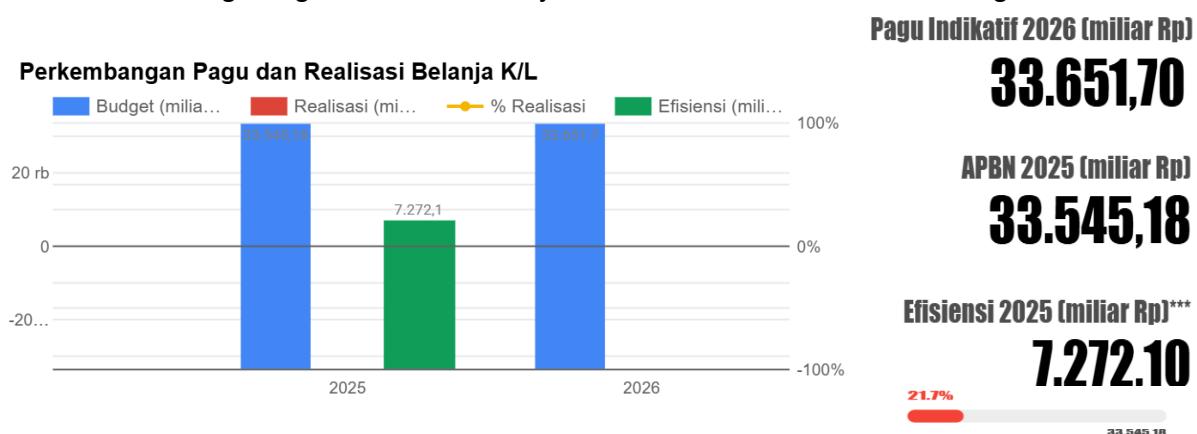
MITRA KERJA KOMISI X DPR RI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR MENENGAH



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Pendidikan Dasar Menengah



Keterangan:

- 1) K/L baru pada 2024-2029 pecahan dari Kemendikbudristek
- 2) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
- 3) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025.



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Pendidikan Dasar Menengah berdasarkan Program

Program	2026		2025	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen	2768,45	-	4213,45	-
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	17684,31	-	11706,2	-
Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	-	-	141,647953	
Program Pendidikan Pelatihan Vokasi	4,7	-	1195,793041	
Program Wajib Belajar 13 Tahun	19172,4		10309,977675	



Capaian Kinerja

Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Kesiapan Sekolah	%	75,59	76,54	101,26%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	%	99,32	99,16	99,84%
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	96,34	96,10	99,75%
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/SMLB	%	92,80	86,34	93,04%
5	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	%	0,52	0,52	100%
6	Proporsi Peserta Didik Yang Memiliki Nilai Di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Literasi	%	59,49	68,13	114,52%
7	Proporsi Peserta Didik Yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum (Numerasi)	%	45,24	62,51	138,17%
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	%	30,00	33,03	110,10%
9	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	48,83	52,69	107,90%
10	Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	%	5,50	9,82	178,54%
11	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan Dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UM	%	45,00	47,88	106,40%

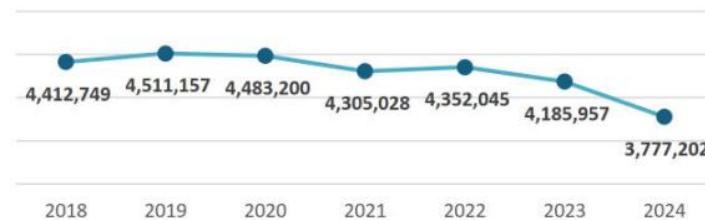
Sumber: : Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2023.

HIGHLIGHT OVERVIEW

PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

- Pagu Indikatif Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Tahun 2026 sebesar Rp33.651 miliar atau Rp33,65 triliun yang sebanyak 52,7 persen atau sebesar Rp17,6 triliun diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan kualifikasi minimal D-IV/S-1, pelatihan kompetensi, dan kesejahteraan melalui sertifikasi. Diharapkan melalui alokasi anggaran untuk program ini, akan tercipta *transfer of knowledge* dari guru kepada peserta didik akan lebih baik. Disamping itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong efektivitas belanja program tersebut untuk mendorong Indeks Pemerataan Guru yang masih di bawah 0,57. Terkait kualitas pembelajaran, berdasarkan hasil Assessment Nasional Tahun 2023 dari semua jenjang dikdasmen baru ada 37% sekolah yang dikategorikan baik sebagaimana disampaikan Bappenas (2025) dalam FGD Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Sementara itu, pada program wajib belajar 13 tahun terdapat peningkatan dari Rp10,3 triliun menjadi Rp19,1 triliun atau meningkat hampir sebesar 90 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah melalui Kemendikdasmen untuk menekan Angka Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data dari Bappenas (2025) ATS mengalami tren yang menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebanyak 3,7 juta anak.

Jumlah ATS Usia 6-18 Tahun



Sumber: Bappenas dalam FGD Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah (2025)

- Selain itu dengan dikabulkannya Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pemerintah (pusat dan daerah) wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar (SD dan SMP) tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta membutuhkan pembiayaan yang memadai.
- Salah satu pos yang perlu mendapat perhatian adalah pada program pendidikan dan pelatihan vokasi yang terjadi pengurangan anggaran secara signifikan dari Rp1,195 triliun menjadi hanya Rp4,7 miliar pada tahun 2026 nanti. Pemangkasan anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi dapat memiliki dampak negatif pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Penting untuk memastikan bahwa program-program vokasi yang esensial tetap mendapatkan dukungan yang memadai. Jika mengacu pada data BPS per Februari 2025, lulusan SMK masih mendominasi kelompok pengangguran terbuka sebanyak **22,37 persen** dari 7,28 juta orang atau mencapai 1,62 juta lulusan SMK yang menganggur. Pemangkasan ini dapat menjadi diskursus mengenai komitmen pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terbuka pada lulusan SMK.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi



Keterangan:

- 4) K/L baru pada 2024-2029 pecahan dari Kemendikbudristek
- 5) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
- 6) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025.



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program (miliar)

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Diktisaintek berdasarkan Program

Program	2026		2025	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen	15,426,9		20,200	-
Program Pendidikan Tinggi	39,025.60		37,600	-
Program Riset dan Inovasi	1,000		-	-

*) miliar rupiah



Capaian Kinerja

Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian Diktisaintek Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1,2 kali UMP)	%	5,50	9,82	178,54%
2	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	Penelitian	86.500	75.669	87,48%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2023

HIGHLIGHT OVERVIEW

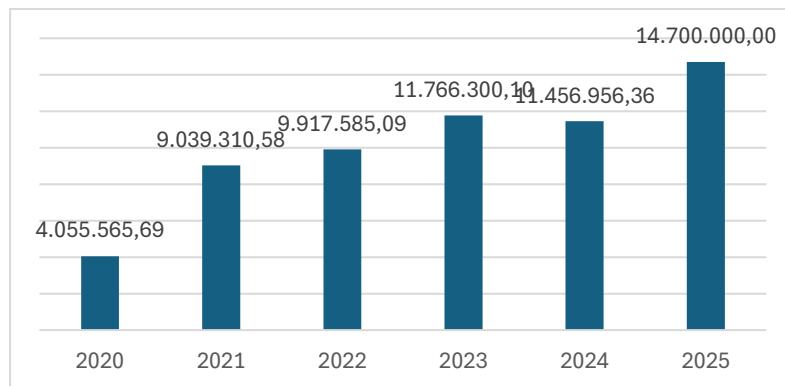
PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

- **Peningkatan alokasi untuk Program Pendidikan Tinggi (Rp39,03 triliun)** diantaranya mencerminkan respons terhadap:
 1. Tingginya jumlah lulusan PT yang belum terserap pasar kerja.
 2. Kebutuhan konektivitas antara pendidikan tinggi dan dunia usaha/industri (DUDI).

Capaian kinerja pada tahun 2023 berupa Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1,2 kali UMP) yang melampaui target sebesar 178,54 persen perlu disikapi secara lebih bijaksana. Meskipun melampaui target, tetapi jika dilihat secara komprehensif berarti hanya 9,82 persen lulusan PT yang mencapai prestasi tersebut. Sisanya kemungkinan masih menganggur atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat permasalahan dimana lulusan baik dari PTN maupun PTS sulit mencari pekerjaan. Survei BPS per Februari 2025 mencatatkan bahwa lulusan perguruan tinggi (D4, S1, S2, S3), yang menyumbang tingkat pengangguran sebanyak 6,23 persen. Pada jenjang ini, persentase pengangguran meningkat dibanding Februari 2024 yang hanya sebesar 5,25 persen.

- Program Pendidikan tinggi tersebut diantaranya juga dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Adapun alokasi KIPK dari tahun 2020-2025 **menunjukkan tren yang terus meningkat**.

Alokasi KIPK Tahun 2020-2025



Sumber: BPK RI (2025)

Komisi X DPR RI perlu mendorong efektivitas dan akuntabilitas KIP pada tahun 2026. Salah satunya adalah porsi anggaran KIP yang hampir mencapai 50 persen dari belanja program Pendidikan Tinggi. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan

bahwa perencanaan, penyaluran dan pengawasan KIP Kuliah belum tepat sasaran. Permasalahan utama yang ditemukan yaitu pada proses verifikasi dan validasi data penerima yang belum akurat, dan pemotongan dana Bansos KIP Kuliah oleh pemangku kepentingan.

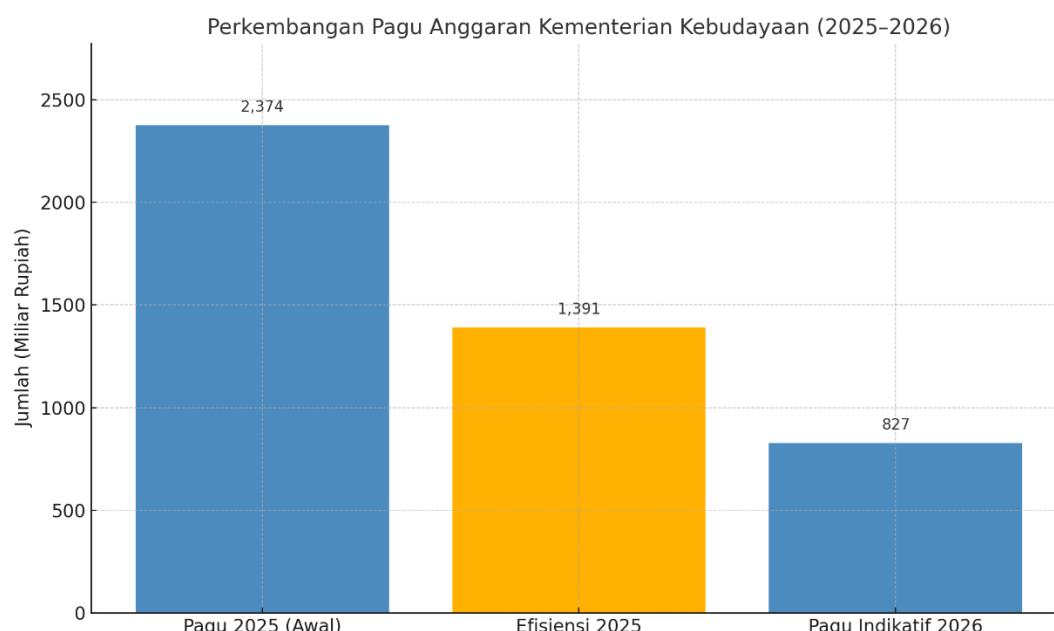
- Munculnya **Program Riset dan Inovasi (Rp 1 T)** seharusnya perlu dilakukan *shifting* atau pergeseran dari "riset akademik" ke arah **hilirisasi inovasi** yang berdampak langsung terhadap ekonomi, pangan, energi, dan kesehatan. DPR RI perlu melakukan pengawasan atas hasil/keluaran dari riset yang dilakukan oleh PT tersebut agar berdampak langsung kepada daya saing dan kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan data capaian kinerja bidang diktisaintek. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat masih belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu perlu menjadi perhatian bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong Kemendiktisaintek beserta satker PT untuk fokus pada keluaran penelitian yang membawa dampak dan sesuai dengan Asta Cita Pemerintah 2024-2029.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Kebudayaan



Keterangan:

- 7) K/L baru pada 2024-2029 pecahan dari Kemendikbudristek
- 8) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
- 9) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025.



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program (miliar)

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Kebudayaan berdasarkan Program

Program	2026		2025	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	62,3		1.261,6**	-
Dukungan Manajemen	765,1		1.112,4	-

*) miliar rupiah

**) asumsi berdasarkan data KEM-PPKF 2025 saat masih di dalam nomenklatur Kemendikbudristek dan belum dikenai efisiensi



Capaian Kinerja

Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian Kebudayaan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks pembangunan kebudayaan	%	61,20	55,13	90,08%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2023.

HIGHLIGHT OVERVIEW PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

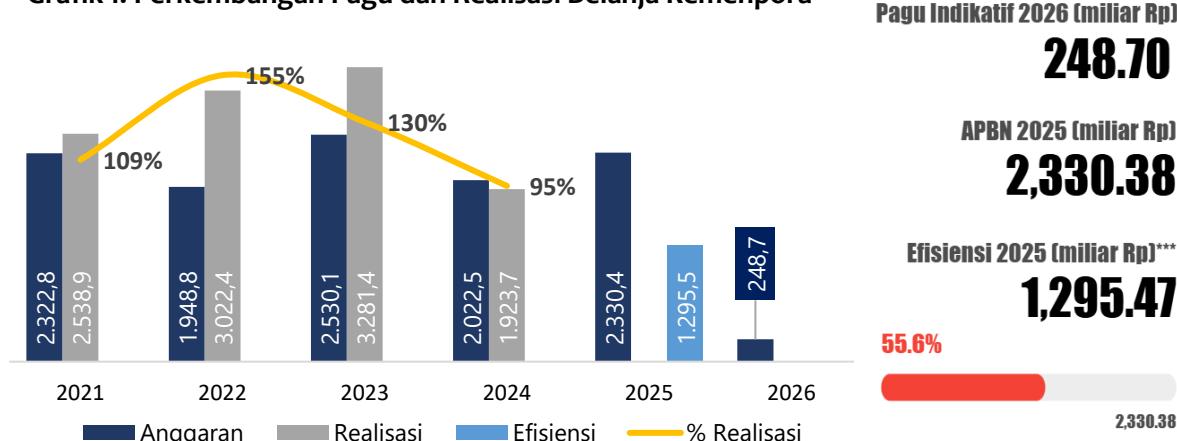
- Pada program pemajuan pelestarian kebudayaan terdapat pemangkasan yang besar pada tahun 2026 mencapai 95 persen dari Rp1,26 triliun pada 2025 menjadi Rp62,3 miliar. Tantangan pemajuan kebudayaan sangat kompleks dan multidimensi. Penurunan pagu menjadi Rp827,4 miliar tahun 2026 berisiko besar terhadap kelangsungan program strategis yang selama ini menopang pelestarian budaya, fasilitasi pelaku seni, dan dokumentasi warisan nasional.
- Anggaran pemajuan kebudayaan dalam pagu indikatif sebesar Rp62,3 miliar berpotensi tidak mencukupi untuk pembiayaan **8 Objek Pemajuan Kebudayaan**, seperti bahasa daerah, cagar budaya, kesenian, tradisi lisan, dan pengetahuan tradisional. Program strategis seperti **Festival Budaya Nasional**, **Digitalisasi Warisan Budaya**, dan **Fasilitasi Pelaku Budaya Daerah** kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian drastis atau bahkan dihentikan.
- Dengan pagu program dukungan manajemen pada pagu indikatif mencapai 92 persen atau sebesar Rp765,1 miliar, Program ini **bukan langsung menyentuh substansi kebudayaan**, melainkan digunakan untuk:
 - Biaya operasional kantor pusat dan UPT (gaji, listrik, sewa, dll.).
 - Perjalanan dinas pegawai dan rapat koordinasi.
 - Belanja barang umum, pemeliharaan, dan pengadaan sarana non-program.
- Postur anggaran seperti ini kurang ideal, karena sebagian besar dana habis untuk operasional kementerian. Jumlah kegiatan budaya, pelestarian tradisi, dan pembinaan komunitas budaya akan menurun drastis. Padahal dalam LHP BPK RI Atas Kinerja Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. 2023, BPK menyoroti kurangnya dukungan anggaran oleh Ditjen Kebudayaan (pada saat masih satu dengan Kemendikbudristek) dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Kemenpora



Keterangan:

- 10) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN Tahun 2024
- 11) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
- 12) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025

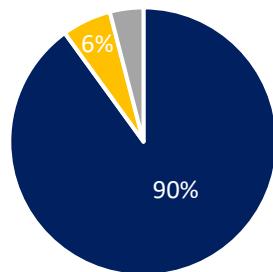
Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Program

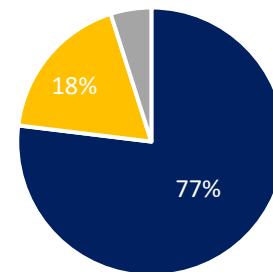
Program	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Dukungan Manajemen	315,4	323,3	319,3	370,4	423,2	215,7
Program Keolahragaan	1.888,7	1.441,6	2.049,6	1.490,8	1.792,7	33,0
Program Kepemudaan	118,7	184,9	161,2	161,2	114,5	0

Proporsi Belanja K/L Berdasarkan Jenis dan Fungsi

Grafik 2. Proporsi Belanja Berdasarkan Jenis



Grafik 3. Proporsi Belanja Berdasarkan Fungsi



■ Barang ■ Pegawai ■ Modal

■ Pariwisata ■ Pendidikan ■ Pelayanan Umum



Capaian Kinerja

Tabel 1. Capaian Kinerja Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

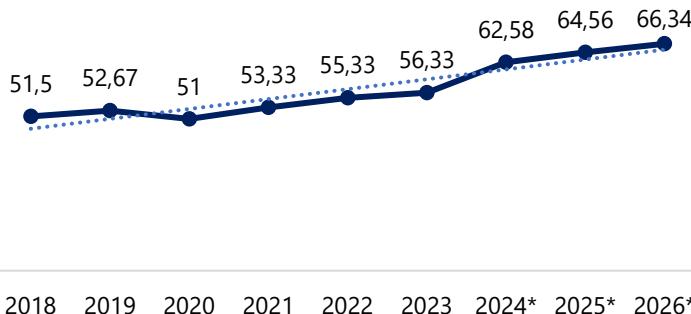
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
1	Indeks Pembangunan Pemuda	56,65	55,3	97,66	Baik
2	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	78	86,89	111	Sangat Baik
3	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	37%	25,4%	68,6	Kurang
4	Persentase tingkat kebugaran jasmani masyarakat	28%	17,9%	63,9	Kurang
5	Peringkat pada Asian Games	12	13	92,3	Baik
6	Peringkat pada Asian Para Games	6	8	133,3	Sangat Baik
7	Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat Internasional	80%	81%	101	Sangat Baik
8	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada Level Internasional	80%	81,92%	102	Sangat Baik

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2023

HIGHLIGHT OVERVIEW PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

- Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp248,7 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 89% jika dibandingkan dengan anggaran TA 2025 yang sebesar Rp2.330,4 miliar.
- Pagu Indikatif Kemenpora TA 2025 sebagian besar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen yaitu sebesar Rp215,7 miliar (87%). Sisanya digunakan untuk belanja Program Keolahragaan sebesar Rp33 miliar (33%). Sementara Program Kepemudaan tidak mendapatkan alokasi sama sekali.
- Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2023 adalah sebesar 56,33 persen. Selama periode waktu 2016-2022, terdapat peningkatan IPP setiap tahunnya, namun hanya meningkat rata-rata 1 persen per tahun. Kondisi tersebut menggambarkan sulitnya pemerintah mencapai target IPP pada tahun 2026 yaitu sebesar 66,34 persen. Kemenpora dapat memulai pilot project sebagai langkah intervensi pada wilayah-wilayah dengan capaian IPP yang masih rendah.

Grafik Capaian IPP Tahun 2018-2023



Sumber: Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024

- Kemenpora perlu memaksimalkan kolaborasi lintas sektor sesuai Perpres No. 43 Tahun 2022 untuk mengatasi keterbatasan anggaran bidang kepemudaan. Sinergi dengan K/L lain seperti Kemendikbudristek, Kemenaker, dan Kemenkes penting untuk mendukung peningkatan indikator pembangunan pemuda. Integrasi program, pemanfaatan database kepemudaan, dan penyusunan rencana aksi terpadu akan memperkuat efektivitas anggaran.
- Berdasarkan Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2023, baru terdapat 28 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan. Untuk itu, Kemenpora harus mendorong partisipasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini belum bersinergi agar implementasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 dapat segera terwujud. Kemenpora juga perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada setiap K/L yang menyelenggarakan pelayanan kepemudaan terkait kejelasan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam mendukung pembangunan bidang kepemudaan.
- Kemenpora RI perlu meningkatkan sosialisasi Desain Besar Kepemudaan Nasional untuk memperkuat substansi pengaturannya serta mendorong adopsi dan integrasi program kepemudaan dalam RPJMD, Renstra K/L, dan kebijakan lintas sektor.

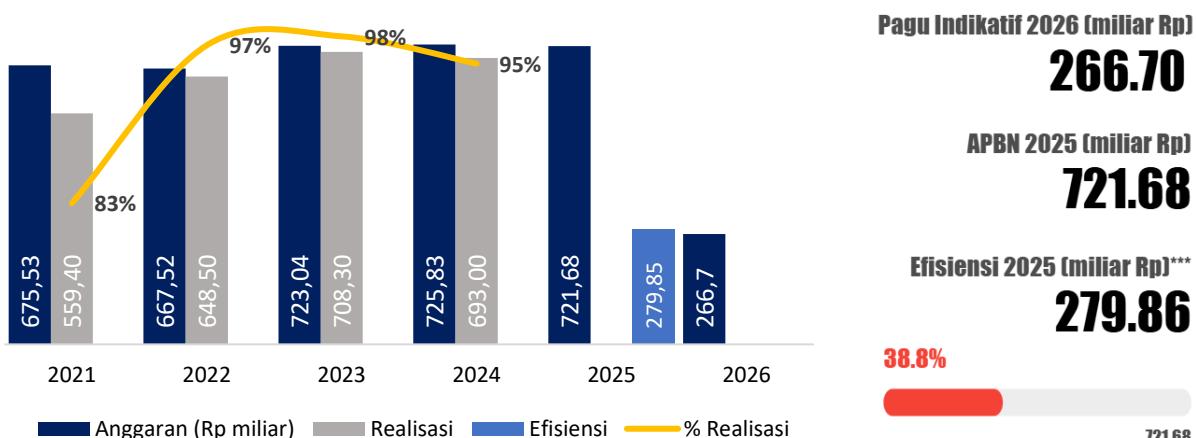
Dalam rangka menyambut Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026, Kemenpora perlu merancang sistem pelatihan yang terstruktur untuk berbagai cabang olahraga, juga menyiapkan penghargaan yang layak kepada atlet, pelatih, dan tenaga pendukung berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Berdasarkan pengalaman event sebelumnya, program pelatihan jangka panjang perlu diprioritaskan agar pembinaan berlangsung berkelanjutan, sehingga atlet lebih siap secara fisik dan mental serta berpeluang meraih prestasi optimal. Selain itu, Kemenpora perlu mendorong pemerataan fasilitas olahraga di daerah, serta mengoptimalkan potensi atlet muda dari berbagai wilayah, tanpa hanya terfokus pada cabang olahraga yang populer.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Perpusnas RI



Keterangan:

- 13) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN Tahun 2024
 14) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
 15) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025

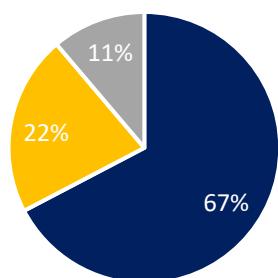
Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Belanja Perpusnas RI berdasarkan Program

Program	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Dukungan Manajemen	229,74	236,63	257,95	262,09	459,59	0,10
Program Perpustakaan dan Literasi	445,80	430,89	465,09	463,74	262,09	266,60

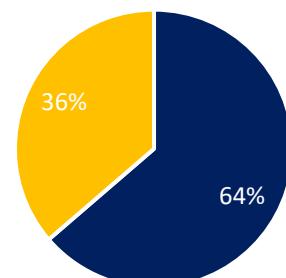
Proporsi Belanja K/L Berdasarkan Jenis dan Fungsi

Grafik 2. Proporsi Belanja Berdasarkan Jenis



■ Barang ■ Pegawai ■ Modal

Grafik 3. Proporsi Belanja Berdasarkan Fungsi



■ Pendidikan ■ Pelayanan Umum



Capaian Kinerja

Tabel 2. Capaian Sasaran Program Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1:12	1:7
2	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	1:16.000	1:11.128
3	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	23,36	55,24
4	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	2,00	2,22
5	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	95,00	90,09
6	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI	2,5	9,27
7	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi Koleksi Nasional	5	5,43
8	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	22,57	28,38

Sumber: Laporan Kinerja Perpusnas RI Tahun 2024

HIGHLIGHT OVERVIEW PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) memperoleh alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp266,7 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 63% jika dibandingkan dengan anggaran TA 2025 yang sebesar Rp721,7 miliar.
- Pagu Indikatif Perpusnas RI TA 2025 dialokasikan untuk belanja Program Perpustakaan dan Literasi sebesar Rp266,6 miliar (99%) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp0,10 miliar (3%).
- Capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian TGM dan IPLM nasional pada tahun 2024 yang masih berada pada kategori “sedang”. Rendahnya capaian indikator terkait budaya baca dan literasi tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, rendahnya minat baca di berbagai kelompok usia, serta belum meratanya layanan perpustakaan di daerah.
- Jarak perpustakaan yang jauh dari tempat tinggal dan kesediaan koleksi bacaan yang terbatas dapat menjadi faktor penghambat bagi masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional RI perlu memastikan alokasi DAK Fisik Sub-bidang Perpustakaan digunakan secara efektif untuk pembangunan dan peningkatan sarana prasarana, dengan mempertimbangkan status kondisi sarpras perpustakaan dan peta kondisi tingkat literasi masyarakat di setiap daerah.
- Perpusnas RI perlu mendorong perpustakaan di daerah untuk menyediakan koleksi bacaan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Misalnya pengadaan buku tentang perikanan bagi perpustakaan yang terletak di daerah pesisir. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan masyarakat sekaligus

memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi yang bermanfaat dan kontekstual bagi kebutuhan masyarakat setempat.

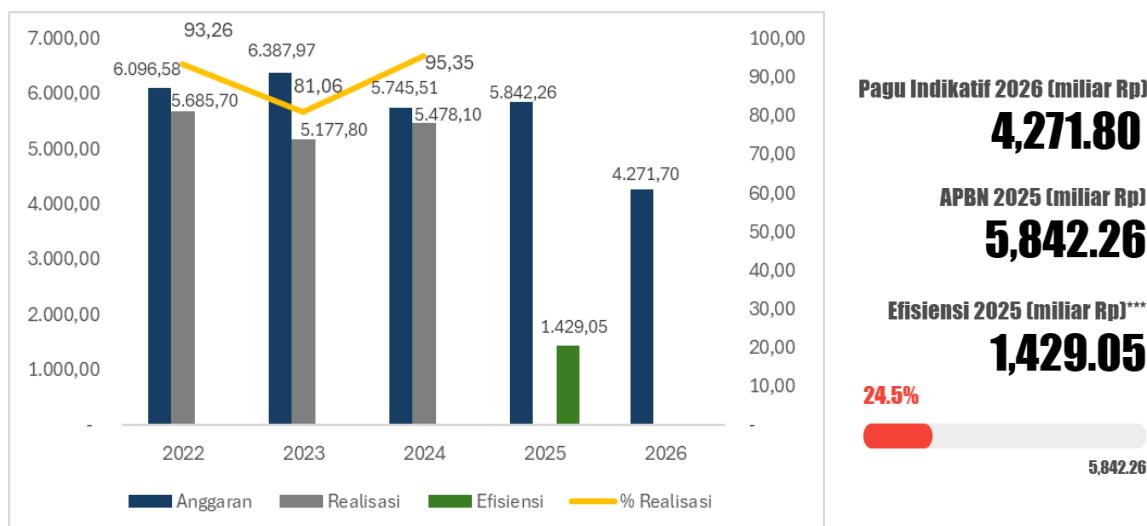
- Perpusnas RI perlu meninjau kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk perpustakaan yang berasal dari APBD agar sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam SNP diatur bahwa APBD Provinsi untuk perpustakaan paling sedikit dialokasikan sebesar Rp5M bagi daerah dengan jumlah penduduk kurang dari 5 juta jiwa atau Rp1000 per kapita bagi daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta.

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Badan Riset dan Inovasi Nasional



Keterangan:

- 16) Angka LKPP T.A 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024
- 17) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L T.A 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
- 18) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025.



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Tabel 1. Pagu Belanja Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Program (Miliar Rupiah)

Program	2026		2025		2024		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dukungan Manajemen	3.637,6		3.826,9		3.748,3	3.615,3	4.141,4	1.630,7
Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	634,2		2.015,3		1.997,2	1.862,8	2.246,6	3.547,1



Ringkasan Target Kinerja

Tabel 2. Ringkasan Target Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, badan usaha dan industri	Inovasi yang dimanfaatkan	300	303	101
2	Rasio jumlah periset per sejuta penduduk	Rasio	2.580 - 2.880	1.574	61,01

3	Rasio anggaran riset non-pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah	Rasio	0,3 – 0,35	0,274	91,30
4	Rasio dampak sitasi BRIN terhadap sitasi global	Rasio	0,75 – 0,87	1,11	127,58
5	Indeks Reformasi Birokrasi BRIN	Indeks	86	86,21*	-
6	Opini Atas Laporan Keuangan BRIN	Opini	WTP	WTP	100

Sumber: Laporan Kinerja BRIN T.A 2024

Catatan: *) Hasil penilaian mandiri BRIN

HIGHLIGHT OVERVIEW

PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

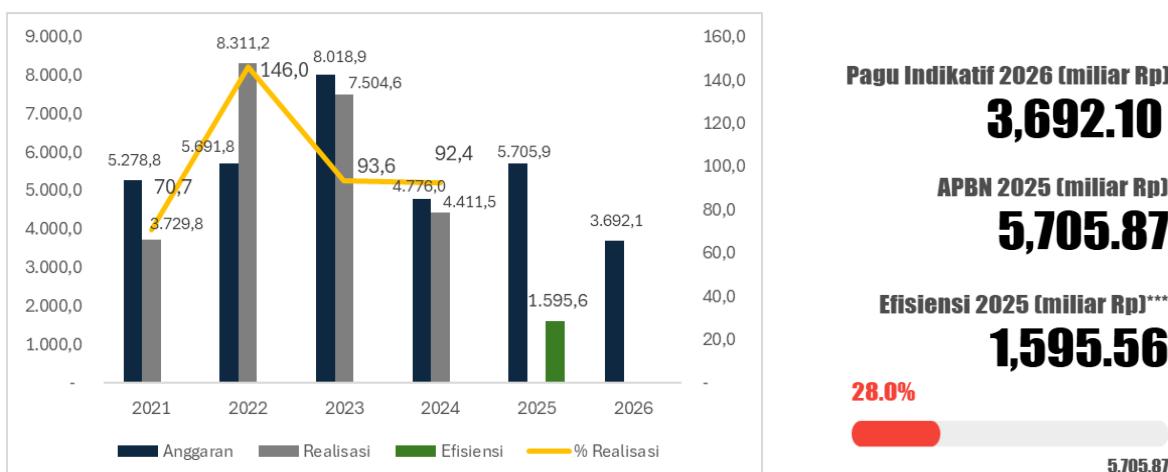
- Pagu Indikatif Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2026 sebesar Rp4.271,7 miliar, yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.637,6 atau setara 85,15 persen dari pagu, dan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp634,2 miliar atau setara 14,84 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 26,88 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp5.842,3 miliar. Adapun penurunan tersebut juga terjadi pada seluruh program, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar 4,95 persen, dan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar 68,53 persen dari pagu tahun 2025.
- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2025 diarahkan untuk sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (SDM), dukungan teknis, OM prasarana bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), kebijakan bidang Iptek, pendidikan dan kebudayaan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan fasilitasi dan pembinaan lembaga. Namun, penurunan signifikan pada anggaran tahun 2026 tersebut dapat memengaruhi upaya pemenuhan sasaran program, khususnya terkait peningkatan kapasitas dan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, walaupun Global Innovation Index (GII) Indonesia tahun 2024 menunjukkan peningkatan, yaitu peringkat 54 dari 113 negara, beberapa skor indikator mengalami penurunan antara lain *Research and Development* (R&D) yang menurun sebesar 0,1, *knowledge absorption* sebesar 7,3, *knowledge impact* sebesar 6,5, dan *knowledge diffusion* sebesar 6,4. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan peningkatan kapasitas dan kontribusi riset oleh BRIN. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong BRIN untuk tetap mengoptimalkan kegiatan peningkatan kapasitas dan kontribusi riset di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.

BADAN PUSAT STATISTIK



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Badan Pusat Statistik



Keterangan:

- 19) Angka 2024 merupakan Laporan Kinerja BPS T.A 2024
- 20) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L T.A 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025
- 21) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025.



Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Tabel 1. Pagu Belanja Badan Pusat Statistik berdasarkan Program (Miliar Rupiah)

Program	2026		2025		2024		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dukungan Manajemen	3.326,5		3.527,03		3.433,3	3.368,74	3.247,52	3.113,6
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	365,6		2.178,84		1.342,71	1.042,71	4.771,39	4.391



Ringkasan Target Kinerja

Tabel 2. Ringkasan Target Badan Pusat Statistik Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Percentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	%	100,0	98,61	98,61

2	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	%	98,00	98,99	101,01
3	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	55,00	59,46	108,11
4	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	86,00	86,49	100,57
5	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri	%	57,00	59,46	104,32
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Opini	WTP	WTP	100,00
7	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	%	99,00	98,95	99,95

Sumber: Laporan Kinerja BPS T.A 2024

HIGHLIGHT OVERVIEW

PAGU INDIKATIF TAHUN 2026

- Pagu Indikatif Badan Pusat Statistik tahun 2026 sebesar Rp3.692,1 miliar, yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.326,5 atau setara 90,1 persen dari pagu, dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp365,6 miliar atau setara 9,9 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 35,29 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp5.705,87 miliar. Adapun penurunan tersebut juga terjadi pada seluruh program, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar 5,68 persen, dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar 83,32 persen dari pagu tahun 2025.
- Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik tahun 2025 diarahkan untuk fasilitas dan pembinaan lembaga, data dan informasi publik, serta sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, penurunan signifikan pada anggaran tahun 2026 tersebut dapat memengaruhi upaya pemenuhan sasaran program, khususnya terkait penyajian data dan informasi publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Badan Pusat Statistik untuk tetap mengoptimalkan penyediaan data dan informasi publik kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.
- Capaian sasaran kinerja BPS Tahun 2024 yang melampaui target pada 5 (lima) indikator, meskipun menunjukkan hasil positif, juga dapat mengindikasikan bahwa proses perencanaan kerja belum sepenuhnya matang. Ketidaktepatan dalam menetapkan target yang terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kapasitas riil pelaksanaan mencerminkan kurang optimalnya analisis kebutuhan, estimasi sumber daya, serta proyeksi capaian yang dilakukan pada tahap perencanaan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam alokasi anggaran, karena anggaran yang disusun berdasarkan target yang tidak akurat dapat mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang tidak proporsional. Oleh karena itu, capaian yang melampaui target perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi perencanaan yang lebih cermat dan berbasis data agar sasaran kedepannya dapat disusun secara lebih realistik dan akuntabel.

25 JUNI 2025

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum

PENANGGUNG JAWAB

**Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H.,
M.Kn., QGIA, QHIA., QIA**

TIM PENYUSUN

**Slamet Widodo, S.E., M.E.
Eko Adityo Ananto, S.E., MBA
Savitri Wulandari, S.E.
Deasy Dwi Ramiayu, S.E.**